

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan manusia, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan mutlak harus dilakukan oleh setiap manusia. Oleh karena itu proses pendidikan merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan, baik bersifat individu maupun kelompok. mulai dari pendidikan dalam keluarga, di sekolah, dan pendidikan di masyarakat. Melalui proses pendidikan manusia akan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa baik moril maupun spirituil, akan melahirkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang luhur, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan harapan dan tujuan bagi semua manusia terutama orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 4 tentang tujuan pendidikan nasional sebagai berikut :

“Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, pribadi mantap, dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pendidikan manusia seutuhnya bertujuan agar individu dapat mengekspresikan dan dapat mengaktualisasikan dirinya dengan mengembangkan secara optimal dimensi-dimensi kepribadian, yaitu emosional, intelektual, sosial, moral, dan religius. (Sofyan S. Willis, 1985 : 1). Beberapa upaya dalam pendidikan diarahkan untuk membina perkembangan kepribadian manusia secara menyeluruh dalam berbagai aspek (kognitif, afektif, dan psikomotor) dan nilai-

nilai serta keterampilan yang diperlukan oleh setiap orang, sebagaimana yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam GBHN/Tap.

MPR No. II/MPR/1998, sebagai berikut :

Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriot dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, serta kesadaran kepada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi pada masa depan, iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Budaya belajar di kalangan masyarakat harus dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif, dan keinginan untuk maju (GBHN, 1998 : 54)

Sedangkan menurut Ag. Soedjana : 20 tujuan pendidikan di Indonesia meliputi :

1. Bersikap tepat dan mampu melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya.
2. Bersikap tepat dan mampu melaksanakan tugas kemanusiaan dengan sebaik-baiknya.
3. Bersikap tepat dan mampu melaksanakan tugas bangsa dan negara termasuk kebudayaan dengan sebaik-baiknya.
4. Bersikap tepat dan mampu melaksanakan tugas masyarakat dan tugas lingkungan dengan sebaik-baiknya.
5. Bersikap tepat dan mampu melaksanakan tugas pribadinya dengan sebaik-baiknya, baik jasmaniah maupun rohaniah.

Manusia merupakan makhluk yang paling berhasil membuat loncatan-loncatan dalam perjalanan sejarah. Menurut analisa Karl Mark, manusia bukan saja sebagai produk sejarah, melainkan sebagai pembuat sejarah. Perkembangan ilmu pengetahuan merupakan salah satu bukti yang dihasilkan oleh manusia sebagai produk sejarah. Manusia telah berhasil merambah sampai ke planet lain, namun apakah manusia dengan keberhasilannya telah merasa puas? Ternyata

manusia tidak pernah puas atau mencapai kebahagiaan, seperti yang diungkapkan oleh Albert Einstein sebagai berikut :

Mengapa ilmu yang sangat indah ini, yang menghemat kerja dan membikin hidup lebih mudah, hanya membawa kebahagiaan yang lebih sedikit kepada kita? Jawaban yang lebih sederhana adalah karena kita belum lagi siap belajar bagaimana menggunakannya secara wajar. Dalam peperangan ilmu menyebabkan kita saling meracun dan menjegal. Dalam masa damai ia membikin hidup kita dikejar-kejar waktu dan penuh tidak tentu. Ilmu yang seharusnya membebaskan kita dari pekerjaan yang melelahkan spiritual malah menjadikan manusia budak-budak mesin....(Dikutip dari Yuyun S,1985 : 248).

Sebagai makhluk sejarah, manusia juga adalah makhluk sosial. Nilai keberadaan manusia akan ditentukan oleh seberapa jauh ia dapat menempatkan diri dalam tali ikatan kemanusiaan yang harmonis, baik dalam skala mikro maupun makro. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat berdiri tegak apabila ia melepaskan tali kemanusiaan dimana pun ia berada. Karena itu nilai kemanusiaan merupakan cita-cita moral tertinggi dan itu harus dipelihara dan ditegakkan, kalau tidak maka manusia akan merugi dan menemui kehancuran dalam hidupnya dan nilai manusia disana tidak berarti.

Disamping fungsi-fungsi yang telah disebutkan di atas terdapat fungsi lain yang sangat mendasar yang harus diemban oleh pendidikan, yaitu fungsi religiusitas. Melalui fungsi religiusitas, pendidikan bertanggung jawab didalam upaya menghubungkan manusia dengan pencipta (kholiq), yakni Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini berarti pendidikan berkewajiban membawa manusia untuk mengenal dan mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu pendidikan bukanlah semata-mata proses skuler, apalagi bebas nilai, melainkan harus senantiasa berlandaskan pada tuntutan agama. Tuntutan agama mengandung

dimensi vertikal dan horizontal yang memberi arah untuk membimbing sikap dan tindakan manusia, juga senada dengan itu memberi petunjuk dalam menghadapi dunia esok yang abadi. Tuntutan agama harus merupakan landasan moral yang tertinggi, dan itu tidak dapat digantikan atau dijangkau oleh akal budi manusia yang terbatas. Kebenaran agama yang mutlak harus diikuti dengan keimanan, bukan dengan akal. Sejarah telah membuktikan bahwa manusia sering jatuh dalam mala petaka akibat mengagungkan akal budi tanpa dibarengi oleh keimanan. Pandangan manusia yang mikro kosmos ternyata tidak dapat menggantikan tuntutan Ilahi yang transendental (Kurtines & Gewirtz, 1984).

Sebagai makhluk sosial yang memiliki mobilitas, banyak atau sedikit manusia pasti berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lain. Mobilitas tersebut dapat bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional. Karakteristik seperti itu menjadi semakin benar, manakala menatap kecenderungan kehidupan modern sekarang ini, di sana penghalang secara geografis tidak lagi menjadi alasan. Berkat kemudahan-kemudahan ilmu pengetahuan dan teknologi mobilitas manusia tidak saja bersifat fisik, melainkan juga bersifat informatif. Dunia yang dulu dianggap sangat luas, sekarang telah menjadi apa yang diistilahkan molutan sebagai global village.

Senafas dengan mobilitas manusia yang semakin cepat dan luas, akan terjadi arus informasi yang deras dan cepat serta dahsyat. Kondisi seperti itu tentu akan membawa implikasi mendasar bagi pendidikan moral, disatu pihak akan terjadi apa yang disinyalir sebagai hegemoni budaya, disana budaya yang satu akan didesak oleh budaya lain yang ditumpang oleh kecanggihan jaringan

informasi. Senafas dengan hal itu pada pihak lain akan terjadi benturan-benturan yang muncul sebagai akibat dari sikap relativistis budaya. Budaya asing yang semestinya tidak boleh masuk ke dalam suatu negara dengan globalisasi budaya tersebut dengan sendirinya akan masuk tanpa bisa dibendung atau disaring terlebih dahulu yang mengakibatkan budaya negara yang dimasukinya menjadi rusak terutama yang berkaitan moral generasi muda.

Persoalannya barangkali tidak akan lebih parah apabila di dunia ini hanya ada satu macam budaya. Kenyataan adalah sebaliknya, maka segera muncul pertanyaan : Dapatkah umat manusia menghilangkan kontradiksi-kontradiksi untuk hidup harmonis dengan tidak saling merugikan satu sama lainnya? Apakah atribut-atribut budaya harus lebih mendahului nilai-nilai kemanusiaan? Atau sebaliknya? Hal itu hanya mungkin apabila umat manusia dapat menata kehidupannya dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip moralitas yang adil dan universal. Oleh karena itu seperti yang telah disadari sejak semula bahwa peran pendidikan menjadi sangat penting, seperti diingatkan Brameld (1957 : 217), sebagai berikut :

Education, as a normative institution, has a responsibility to deal with the issues raised by the problem of relativism and universalism...if the best answer we can find is that the values and hence the goals of men living in cultures are and must inevitably be wholly relative to particular time and place, than the education influenced by such an answer has reason to support on important kind of teaching and learning about this issue. It has reason to teach and learn that the values of cultures are not only different from one to another but that we should tolerate these different, neither condoning not condemoning but rather respecting them for whatever they are.

Namun persoalan berikutnya, pendidikan yang bagaimana? Dan oleh lembaga pendidikan yang mana? Bukankah kenyataan bahwa dunia pendidikan



sekarang ini lebih bergerak ke arah spesialisasi? Atau bukankah aspirasi dan orientasi terhadap pendidikan dewasa ini telah sangat dikonsentrasikan pada tujuan-tujuan kontemporer, terutama untuk tujuan kerja? Seperti bunyi salah satu Tesis Max Weber, "The expert, not the cultivated man or the hero is educational ideal of a bureaucratic age"? (Weber, dalam boocock, 1988 : 130). Demikianlah antara lain keresahan-keresahan yang melatar belakangi munculnya pendidikan umum. Bahwa pendidikan umum berkehendak untuk menciptakan suasana pendidikan seperti yang pernah dikonsepsikan oleh pemikir-pemikir klasik, to be the education men. Tentu saja yang disebut dengan manusia terdidik harus sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku, Manusia-manusia yang menjadi harapan pendidikan umum adalah manusia yang berbudaya, berintegritas dan berwawasan. Terlebih-lebih pengertian pendidikan itu sendiri yang dikemukakan oleh filsuf Yunani kuno adalah merupakan bantuan kepada manusia agar menjadi manusiawi.

Berbicara tentang konsepsi pendidikan nasional, kita tidak boleh melupakan pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara (1889-1959), mengingat beliau adalah perintis dan peletak kerangka landasan pendidikan, yang menjadi pedoman dasar bagi bangunan sistem pendidikan nasional. "Dasar pendidikan dan pengajaran adalah kebangsaan Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya" dan hendaknya selalu diusahakan memperbaiki segala peraturan pengajaran sehingga dapat memenuhi syarat-syarat ukuran internasional. Demikian bunyi kebijakan pertama dari Ki Hajar Dewantara ketika beliau menjadi mendikbud pertama (dikutip dari Notosusanto, 1983).

Maka tampak jelas keluhuran dan keluwesan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Disatu pihak ia menghendaki agar pendidikan tetap terus maju, tetapi di lain pihak ia berharap agar pendidikan tidak putus tali-temalnya dengan kepribadian bangsa. Pada bagian lain kita menemukan lima azas pendirian Taman siswa dari Ki Hajar Dewantara : Kemanusiaan, Kodrat hidup, Kebangsaan, Kebudayaan, dan Kemerdekaan. Azas yang mencerminkan ciri khas pendidikan kita. Kita juga mengenal Dewantara lewat semboyan : Tut Wuri Handayani, Ing Madya Mangunkarso, Ing Ngarso Sungtulodo yang lebih tepat disebut sebagai petunjuk praktis pendidikan. Tentu konsepsi-konsepsi Dewantara seperti disebutkan di atas merupakan hasil sintesis antara berbagai pemikiran-pemikiran tokoh pendidikan di suatu pihak, dan dikaitkan dengan kondisi objektif pendidikan di tanah air di pihak lain. Jadi, pemikiran-pemikiran beberapa tokoh pendidikan seperti Montessoery Frobel dan Rabinranath Tagore, misalnya turut memberi inspirasi atau nuansa terhadap Dewantara dalam melahirkan gagasannya.

Dengan demikian apabila dipahami esensi pendidikan moral sebagai upaya untuk mendekatkan manusia kepada kebudayaan dan masyarakatnya, maka jelas dalam konsepsi Dewantara tersedia jawabannya. Dalam konteks sekolah, kita dapat menyatakan bahwa Dewantara tidak mengharapkan sekolah-sekolah melahirkan orang-orang yang asing dengan masyarakatnya. Dimata beliau kebudayaan adalah penentu kepribadian. Maka seyogyanya sekolah dan guru-guru tidak boleh melupakan prinsip-prinsip itu betapapun mereka disibukan oleh perkara-perkara kontemporer.



Sekarang yang menjadi masalah adalah seberapa jauh konsep Dewantara itu dapat diterapkan secara mantap oleh guru-guru di sekolah atau perlu diajukan pertanyaan, apakah konsepsi-konsepsi itu masih relevan? Ditengah-tengah fenomena pendidikan yang sedang berubah, secara jujur harus diakui sulit untuk menjawabnya. Suasana kini memang telah jauh berbeda dengan ketika Dewantara merumuskan gagasannya hingga boleh jadi akan ada yang menganggap konsepsi Dewantara itu sebagai tidak fungsional. Untuk menemukan kepastian akan hal itu, kita harus kembali kepada dasar yuridis formal pendidikan nasional yakni Pancasila, UUD 1945, UUSPN, dan GBHN. Disini kita tidak akan memindahkan perangkat keputusan pendidikan itu dalam lembaran yang terbatas ini, kecuali dengan mengutip beberapa pasal yang terdapat dalam USPN yang telah dikutip di atas.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara terdapat kata-kata secara eksplisit menggambarkan akan pentingnya pendidikan moral, yakni : *Iman, taqwa, berbudi luhur, berwawasan dan tanggung jawab kemasyarakatan serta kebangsaan*. Pada bagian lain terdapat pula pernyataan tentang bagaimana sekolah harus melakukan fungsi pendidikan moral. Misalnya tentang Wawasan Wiyatamandala bagi sekolah menengah. (USPN, pasal 10 ayat 1) sebagai berikut :

1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan.
2. Kepala Sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolahnya.
3. Antara guru dan orang tua harus ada saling pengertian dan kerja sama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan.
4. Para warga sekolah di dalam maupun di luar kelas sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru.
5. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung kerukunan antar warga sekolah.



Dengan menganalisis substansi dan konsepsi konsep pendidikan nasional dapat disimpulkan bahwa sekolah tidak boleh memandang dan memperlakukan anak-anak sebagai manusia monodimensi, akan tetapi harus memperlakukannya sebagai manusia yang paripurna (utuh), sehingga sebaliknya dari sekolah mereka tidak asing bagi masyarakat. Karena itu struktur dan fungsi-fungsi di sekolah beserta peranan guru harus relevan dengan kenyataan ideal yang berlaku dalam masyarakat.

Kenyataan dalam banyak hal sering tidak sesuai dengan harapan, hal ini berlaku juga dalam pendidikan. Sebetulnya segala persoalan pendidikan yang dihadapi oleh hampir semua bangsa dewasa ini terakumulasi dalam apa yang disebut “keprihatinan generasi tua terhadap perilaku generasi muda” (Abu Suud, 1986 : 42). Ini merupakan suatu pernyataan yang mengisyaratkan disfungsi pendidikan moral. Seberapa jauh kebenaran pernyataan itu? Apakah ia merupakan sinyalemen atau personal judgment seseorang? Hal ini mari kita kaji lebih lanjut.

Pertama-tama kita mengasumsikan bahwa persoalan pendidikan moral atau yang erat kaitannya dengan pendidikan moral adalah bersifat universal. Kemudian kita memakai analisis ilmiah, melalui perspektif antropososiologis sebagai suatu bidang kajian yang banyak mengkaji hubungan antara pendidikan dan masyarakat.

Tahun 1961 Coleman menggelar sebuah buku yang berjudul “The adolescent Society”. Tesis utama Coleman adalah munculnya budaya remaja sebaya (student peer culture) yang mengisolasi diri dari masyarakat dewasa. Tampilnya budaya sub kelompok ini, menurut Coleman adalah disebabkan karena



kompleksitas kehidupan masyarakat industri. Disatu pihak keluarga banyak kehilangan atau melepaskan fungsi-fungsi khas yang sebelumnya mereka miliki, di pihak lain lembaga pendidikan formal (sekolah) semakin banyak dihadapkan kepada fungsi-fungsi baru, bahwa sekolah diminta untuk memainkan peran-peran pendidikan keluarga, sementara sekolah juga dibebani oleh tugas-tugas akademis yang sudah terakumulasi sebelumnya. Namun dalam kenyataannya sekolah tidak mampu menggantikan peran-peran pendidikan keluarga yang bersifat khusus itu. Akibat kegagalan dari transmisi itu peran dari keluarga ke sekolah, akhirnya anak-anak memilih jalannya sendiri, yakni mereka bergabung membentuk kelompok budayanya tersendiri. Seperti digambarkan Coleman "with his fellows he comes to constitute a small society one that has most of its important interaction within it self and maintains only a few threads of connection with the outside adult society" (Coleman, 1961 : 3).

Munculnya masyarakat remaja seperti itu bukan tidak pernah diperkirakan sebelumnya, sungguhpun tidak banyak yang menaruh antisipasi terhadapnya. Beberapa tahun sebelumnya Talcott Parsons (1951) telah mengkonsepsikan bahwa bila perkembangan struktur masyarakat Amerika Serikat yang semakin kompleks itu tidak berjalan paralel dengan pola-pola nilai dasar (basic value pattern), maka generasi tua akan kehilangan anak-anaknya. Parson mempertegas bahwa munculnya adolescent society adalah akibat dari kecenderungan untuk terlalu cepat berdiri sendiri (autonomy) di kalangan anak-anak, dan diperkuat oleh sikap serba boleh (permissiveness) dari praktek-praktek pendidikan progresif (Boocock, 1968 : 213).

Secara fair harus diakui bahwa tampilnya sekolah-sekolah ke panggung kehidupan selain telah banyak membawa harapan telah memunculkan sejumlah permasalahan, namun kesalahannya tidak hanya terletak pada sekolah, melainkan sebahagiannya harus dikembalikan kepada orang tua atau masyarakat itu sendiri. Mengapa mereka menaruh harapan yang terlalu besar pada sekolah? Terlepas dari tuduh menuduh seperti itu, dewasa ini kita melihat suatu fenomena baru dalam cara-cara kita mempersiapkan anak-anak, yakni kita cenderung telah menciptakan jarak dengan mereka. Seperti digambarkan oleh Ari'es sebagai berikut:

“.....we have been witnessing a long-range shift in youth socialization and learning L From activities that integrate youth and edult and that emphasize affect-oriented activities, toward activities that isolate the young from edult life and emphasize cognitive learning” (Ari'es, dalam Stub, 1975 : 118).

Kutipan di atas secara sosiologis mengungkapkan adanya indikasi bahwa telah terjadinya perubahan dalam praktek-praktek pendidikan yang patut menjadi perhatian. Yang menjadi pertanyaan, apakah fenomena-fenomena yang digambarkan di atas jauh dari situasi di Indonesia? Tentu saja diperlukan banyak kajian untuk menjawabnya. Namun demikian tidak terlalu sulit mencari bukti-bukti untuk mengatakan bahwa fenomena dan praktek-praktek pendidikan di negara kitapun telah berubah, bahkan secara drastis. Ada indikasi yang menyatakan bahwa fenomena sekolah-sekolah kita telah banyak dikonsentrasikan pada tujuan-tujuan kontemporer, ada yang menyatakan bahwa corak dan pola pendidikan telah bergeser dari pola “paedagogik ke transformatif”. Mengenai uraian ini dapat disimak sebuah tulisan tentang Keharusan dan Keperluan Ilmu Pendidikan oleh team pengkaji IKIP Jakarta (1990). Didalam tulisan itu antara

lain dikatakan bahwa alasan-alasan pembangunan telah memaksa sekolah dan guru-guru lebih mengejar kualifikasi akademik dan profesional, dimana mengajar lebih dipandang krusial dari mendidik (hal. 26-27). Akibatnya tugas-tugas mendidik dalam menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dengan sendirinya menjadi terabaikan.

Memang tidak mudah menentukan kebenaran sinyalemen di atas, sebab sebuah generalisasi biasanya dihiasi oleh persoalan judgment dari yang merumuskannya. Lagipula generalisasi itu tidak jelas dialamatkan ke mana? Dan guru yang mana? Maka untuk memberikan jawaban, paling tidak lebih banyak lagi studi-studi empirik.

Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan di atas adalah sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal tempat membina kepribadian anak didik. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh A. Kosasih Djahiri (1985 : 4), sebagai berikut :

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan tempat belajar anak didik dalam berusaha membina, mengembangkan, dan menyempurnakan potensi dirinya, serta dunia kehidupan dan masa depannya, sekolah merupakan salah satu tempat untuk mempersiapkan generasi muda menjadi manusia dewasa dan berbudaya.

Kini dunia modern semakin dipenuhi oleh kontradiksi, makin banyak manusia yang mewah tetapi kehilangan arah, kehidupan manusia semakin dihadapkan pada dekadensi moral, pelecehan etik, krisis identitas, semua itu terakumulasi dalam apa yang disebut sebagai gejala “dehumanisasi”. Banyak yang jatuh menjadi korban, kebanyakan adalah yang tidak berdosa.

Mengenai akar-akar dari fenomena tersebut seperti diungkapkan oleh Titus (1984 : 148), sebagai berikut :

Adalah suatu kenyataan bahwa teknik dan kemampuan kita telah berkembang lebih cepat dari pada pemahaman kita tentang apa yang kita anggap sebagai tujuan kita dan nilai-nilai. Barangkali perhatian yang telah diperbaharui terhadap tujuan-tujuan tersebut akan membantu kita dengan jawaban-jawaban yang sangat kita perlukan untuk menjawab krisis dan keresahan yang merupakan bagian dari dunia modern.

Ilmu bergerak secara universal, budaya bersifat partikular dan pendidikan mencakup keduanya, maka pada sudut pandang ini paling tidak pendidikan memainkan peran dua fungsi, yaitu fungsi kecendekiawanan dan fungsi pembudayaan. Fungsi yang pertama berkaitan dengan ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi, sementara fungsi yang kedua menekankan nilai-nilai, etika, dan moral. Kedua fungsi itu seyogyanya berjalan secara harmonis, tidak boleh berat sebelah. Ilmu memajukan kebudayaan dan kebudayaan menjadikan kebermaknaan ilmu. Harmonisasi kedua fungsi pendidikan itu merupakan harapan dan tugas pendidikan umum.

Pendidikan dapat diartikan sebagai upaya mempersiapkan manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Hubungan manusia dengan dunia tidak pernah statis, karena itu pendidikan adalah proses yang bersifat dinamis, hal ini sesuai dengan manusia adalah makhluk historitas, maka pendidikan harus membantu manusia dalam menjembatani masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang dengan memakai kaca mata sejarah. Dalam keadaan yang demikian mestinya manusia memahami arti hidup yang sebenarnya, seperti kata filsuf eksistensialistis Kierkegaard : “Hidup baru dapat dipahami apabila dibalik mundur tetapi diputar maju”.



Kalau memperhatikan fenomena yang terjadi belakangan ini bahwa para pendidik dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mendidik nilai moral siswa, ini merupakan salah satu pengaruh dari globalisasi yang ditandai dengan derasnya arus informasi yang masuk dan dapat membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap perilaku disiplin anak didik, misalnya ; maraknya tawuran atau perkelahian masal antar pelajar, siswa meninggalkan kelas pada waktu jam belajar, kurangnya rasa hormat siswa terhadap gurunya, dan lain-lain.

Perilaku siswa yang menyimpang itu disisi lain disebabkan oleh komponen-komponen yang ada di sekolah itu sendiri, seperti dikemukakan dalam majalah Pendidikan (Suara Daerah No. 8-9 Tahun 1996) yaitu dalam upaya menegakkan tata tertib siswa di sekolah, ternyata masih terdapat beberapa kendala yang mengganjal dan disebabkan oleh faktor-faktor :

1. Masih ada guru dan staf tata usaha sekolah yang tidak memberikan teladan yang baik terhadap siswanya.
2. Dalam memberikan sanksi dan hukuman bagi siswa yang melanggar masih ada pihak guru yang tidak memberikan sanksi dan hukuman yang mendidik.
3. Masih ada siswa yang mengabaikan tata tertib sekolah.
4. Masih ada pihak orang tua/wali murid baik sengaja atau tidak, yang tidak mendukung penegakkan tata tertib siswa di sekolah.

Oleh karena itu penyimpangan-penyimpangan perilaku yang dilakukan para siswa sudah seharusnya mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak, termasuk pihak sekolah. Hal ini antara lain karena kejadian-kejadian pelanggaran terhadap norma-norma tersebut tidak jarang dilakukan pada saat jam sekolah

sedang berlangsung. Walaupun peristiwanya terjadi di luar sekolah, ini berkaitan dengan kredibilitas sekolah/guru yang lemah dalam menerapkan perilaku disiplin siswa-siswinya.

Dari suatu hasil penelitian Komisi Disiplin Phi Delta Kappa di Amerika Serikat (Wayson, 1992 : 9) membuktikan bahwa betapa pentingnya peranan sekolah dalam membentuk disiplin siswa. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa sekolah yang baik adalah yang “membangun disiplin dengan cara menciptakan sekolah yang kondusif dalam menanamkan disiplin, terhindar dari praktek terisolasi yang berkenaan dengan masalah disiplin”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kepribadian, kebiasaan-kebiasaan nilai moral dan pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara parsial atau fragmental yang bersifat kasuistik, melainkan harus dalam kondisi yang utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan, serta situasi dan kondisi tempat membina kepribadian dan nilai moral harus *kondusif yang dapat membantu dan mendorong kearah terbinanya kepribadian yang utuh dan nilai-nilai moral tersebut.*

Konsep disiplin diangkat ke permukaan dari nilai dasar ke tataran nilai instrumental operasional, tidak terjebak dalam tataran konseptual semata. Disiplin ditegakkan melalui pendekatan nilai yang lebih persuasif (A. Kosasih Djahiri, 1995 : 32)

Hasil penelitian lain dikemukakan oleh Reyes (1995 : 34) berkenaan keterkaitan antara pemilikan nilai, moral, dan norma para siswa dengan pertumbuhan prestasi siswa. Dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa “Futher, student achievement growth in high school is related to two critical elements of

community : shared norms, value and beliefs, as indicated by teachers commitment; and focus on student learning, as indicated by teachers”.

Dari hasil penelitian tersebut ternyata bahwa betapa besarnya peran seorang guru dalam mengembangkan potensi siswanya. Norma, nilai, dan keyakinan termasuk faktor yang sangat berperan dalam mendukung keberhasilan siswanya, sehingga gurunya sendiri dituntut memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan norma, nilai, dan keyakinan dalam kehidupan sehari-hari.

Ungkapan tersebut di atas memberikan makna bahwa proyeksi pendidikan nilai kedisiplinan di sekolah mempunyai peran yang menentukan, yaitu :

Guru dan Kepala Sekolah, serta pihak-pihak terkait lainnya akan sangat membantu dalam menumbuh kembangkan kesadaran (consciousness) dan pengalaman (experience) berdisiplin para siswa, apabila lingkungan sekitar mereka menggiring pada situasi dan kondisi yang kondusif bagi pembentukan manusia yang beriman dan bertaqwa (Z. Darajat, 1980 : 30).

Dalam kenyataannya masih banyak guru sebagai pendidik yang tidak memiliki komitmen dalam upaya menciptakan iklim sekolah yang kondusif dengan menerapkan disiplin. Pembentukan pribadi yang disiplin masih tertuju dan merupakan tanggung jawab guru mata pelajaran tertentu (Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negara dan Pendidikan Agama), hal ini seperti disinyalir oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa upaya meningkatkan kualitas disiplin siswa secara formal masih belum terealisasi secara optimal, sistematis, terarah, dan terpadu. Padahal penerapan disiplin merupakan tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam bidang pendidikan. Melalui penerapan disiplin yang komprehensif, kontinue, dan konsekwen akan berpengaruh terhadap pembinaan moral siswa/anak didik pada umumnya.

Bertitik tolak dari ungkapan-ungkapan di atas, ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan moral di sekolah. Permasalahan tersebut yaitu *“adanya kecenderungan dekadensi atau penurunan moral siswa, yang ditandai dengan tinggkah laku siswa yang bertentangan dengan peraturan, baik peraturan sekolah secara khusus ; seperti : Perilaku kurang sopan seorang siswa kepada guru atau orang tua, datang ke sekolah terlambat atau pulang sebelum waktunya, pakaian seragam tidak dimasukkan ke dalam celana atau rok, berani merokok dengan berpakaian seragam sekolah, maupun melanggar peraturan yang bersifat umum; seperti minum minuman keras dan obat-obat terlarang (narkoba)”*.

Permasalahan-permasalahan tersebut diasumsikan karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Kurangnya kewibawaan dari penyelenggara pendidikan termasuk didalamnya Kepala Sekolah dan Guru.
- b. Situasi sekolah yang kurang mendukung/tidak kondusif untuk melangsungkan proses pendidikan.
- c. Penanaman disiplin yang tidak komprehensif, kontinue, dan konsekwen.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dalam mengungkapkan dan menggambarkan secara komprehensif yang berjudul **“Pengaruh pola pendidikan berbasis disiplin terhadap perkembangan moral siswa”**.(studi deskriptif, analisis pada SMU-Plus yang berlokasi di Cisarua Kabupaten Bandung Jawa Barat)

## B. Perumusan Masalah / Identifikasi Masalah

Dalam karya tulis ini ada tiga masalah pokok yang erat kaitannya dengan perkembangan moral, khususnya moral siswa di sekolah. Dari ketiga masalah tersebut sebagai berikut :

### 1. Masalah Metodologis.

Bagaimanakah agar anak didik dapat memahami, menghayati dan mengamalkan suatu pesan atau tujuan pendidikan? Demikian, antara lain, pertanyaan mendasar yang dihadapi pendidikan moral. Masalah ini sebetulnya lazim dikenal sebagai masalah *metodologis* atau *pendekatan*. Sayangnya, istilah tersebut kadang-kadang diartikan terlalu formal, seakan-akan persoalan di dalam kelas saja. Padahal apa yang diperbuat di dalam kelas adalah sebahagian dari pendidikan moral. Kesadaran ini telah diakui oleh banyak pakar. (lihat Chepy, 1988). Jadi persoalan metodologis dalam pendidikan moral di sekolah tidak terbatas pada optimalisasi proses belajar mengajar di dalam kelas (formal), tetapi juga berkaitan dengan upaya-upaya di luar kelas, seperti bagaimana penerapan disiplin, bagaimana menciptakan hubungan paedagogis antara guru dengan siswa, bahkan juga termasuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di sepanjang lingkungan sekolah. Semua upaya-upaya itu, baik yang berlangsung di kelas maupun di luar kelas, harus bertumpu kepada pembinaan moral anak didik secara mantap dan utuh.

Sebagaimana dipahami bahwa pendidikan moral merupakan upaya menyeluruh (pada manusia) yang didalamnya terjadi proses pembentukan pengalaman belajar yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor



(konatif). Proses tersebut meskipun diharapkan sekaligus, tetapi dalam kenyataannya berlangsung secara bertahap. Ada tahap yang didahului oleh proses kognitif, dan sebaliknya. Hal itu berarti bahwa dalam melaksanakan pendidikan moral diperlukan banyak cara (metode). Metode itu dapat digunakan secara simultan, atau dikombinasikan. Hal itu tergantung pada sifat pengalaman belajar (tujuan, materi, tekanan) yang diinginkan. Ada pengalaman belajar yang didalam prosesnya lebih berorientasi pada aspek kognitif dan intelektual, yang dikenal dengan pelajaran-pelajaran melek moral (*moral literacy*). Mengenai moral literer ini Hirsch E.D (dalam Sherman & Webb, 1989 : 158) menyatakan :

To be "literate" is to know something and be able to use what we know to help us learn more. Thus, we teach children to read by giving them books with familiar content and we help them improve their reading skills by broadening and deepening their knowledge of content. Content is the "tacitly shared background" that students use to hold in common.

Selanjutnya ada pula pengalaman belajar yang pada prinsipnya lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotorik, yakni yang lebih menitik beratkan pada pembentukan watak dan karakter. Dengan kata lain apabila *moral literer* mengandalkan pada pengetahuan dan pemahaman, maka *moral character* lebih menekankan pada pembiasaan atau latihan. Kedua bentuk pendidikan moral itu dilaksanakan dengan turut memperhitungkan tingkat kematangan anak didik (faktor psikologis). Disitulah letak perbedaan metoda yang satu dengan lainnya.

Masalah metodologis ini telah menjadi perbincangan para ahli pendidikan, dan telah muncul banyak teori (lebih jauh akan dibicarakan dalam bab II). Sebagai pengantar disini dapat dikatakan bahwa teori-teori itu dapat digolongkan atas dua macam, yakni *teori satu jalur (one track theory)*, dan *teori dua jalur (two*

*track theory*) (Kohlberg, dalam Curtines & Gewirtz, 1984). Teori satu jalur mengasumsikan bahwa pengetahuan dan tindakan (kognitif dan perilaku) berada dalam satu arah (jalur). Penganut teori itu berpegang pada : *Knowledge is necessary and sufficient*. Sebaliknya penganut teori dua jalur berpandangan bahwa pengetahuan dan tindakan (kognitif dan perilaku) adalah bergerak menurut arahnya masing-masing. Dengan kata lain tidak ada hubungan antara yang diketahui dengan yang dilakukan. Akibatnya, didalam praktek penganut teori ini menekankan pada pembentukan perilaku (behavioral modification). Ada pula teori-teori lain yang merupakan varians dari kedua teori tersebut.

Di Indonesia masalah metodologis ini masih merupakan kajian, belum ada sebuah studi yang menggambarkan secara eksplisit apa yang terjadi di lapangan. Pada pihak lain, kita sering mendengar tentang adanya kelemahan dalam praktek pelajaran moralitas. Adanya tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahwa studi moralitas kita masih sebatas pada kognitif saja. Bagaimanapun, secara tidak langsung tuduhan-tuduhan itu mempermasalahkan guru, dan pada kenyataannya mereka adalah pihak yang paling berhubungan langsung dengan hal itu.

Namun masalah tersebut sebetulnya telah lama menjadi pemikiran. Apabila merujuk kepada Aristotels (penulis percaya bahwa corak pendidikan kita turut diwarnai oleh pemikiran filsuf realis ini) dapat dikatakan bahwa persoalan tersebut tidak sama sekali baru. Bagi Aristotels, apa yang kita konsepsikan sebagai pendidikan moral tidak lain dari upaya manusia menjangkau kebajikan (virtues). Berbeda dengan Plato, Aristotels masalah kebajikan itu bukan masalah



ide-ide (dipikirkan), melainkan harus dimunculkan dalam kehidupan yang nyata.  
Demikian pula halnya dengan pendidikan moral.

Jadi, bila kita kembali kepada pendapat Aristoteles masalah pendidikan moral dilihat dari proses pada dasarnya merupakan masalah keseimbangan antara *reason and habit* (Fieter, 1981). Aristoteles menyatakan : “being just by doing just, temperate by doing temperate”. Ini berarti apabila kita menghendaki agar anak dapat berlaku baik, jujur, taat, dan bijak maka kita harus memberikan kepada mereka pengetahuan dalam arti yang mencakup dimensi dan makna luas, pada saat yang bersamaan kita harus menunjukkan atau membiasakan supaya mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang kita inginkan itu. Dalam konteks sekolah jelas bahwa pendidikan moral tidak cukup dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan moral yang telah dikonseptualisasikan dalam kurikulum yang hanya diberikan di dalam kelas saja. Tetapi upaya transformasi pengetahuan itu masih harus ditindak lanjuti dengan upaya-upaya yang riil disepanjang peluang yang ada dalam setting sekolah. Hanya dengan cara demikian anak niscaya dapat memperluas (*brodening*) dan memperdalam (*deepening*) dari apa yang telah mereka ketahui, dan pada gilirannya mereka dapat menerapkan pengetahuan moral itu dalam perilaku yang nyata di sepanjang hidupnya.

Dengan demikian tersirat pula pengertian bahwa tugas guru di sekolah bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Senada dengan itu yang seyogyanya dimiliki oleh guru tidak hanya kemampuan profesional akademik, namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah sikap kepribadian. Karena ada ungkapan yang menyatakan bahwa guru itu harus digugu dan ditiru, disini suri tauladan dalam

arti perilaku yang baik yang dibutuhkan dari seorang guru. Sebetulnya sikap kepribadian yang dituntut pada seorang guru bukanlah syarat yang terlalu istimewa, maksudnya persyaratan kepribadian itu tidak merupakan sesuatu yang berlebih-lebihan apalagi yang harus dikatakan mustahil. Melainkan itu lebih merupakan sikap-sikap, sifat, maupun perilaku normatif yang senantiasa dapat ditumbuh kembangkan.

Seperti dikatakan Bubber (1985) pendidikan moral itu tidak perlu “genius”, melainkan manusia biasa, hanya saja mereka harus dapat menunjukkan sikap “kesungguhan dan kecintaan” baik terhadap profesi maupun terhadap anak didik. Tetapi dalam kenyataan, seberapa jauh seorang guru dapat menunjukkan sikap-sikap seperti yang dikatakan itu?. Jawabannya tentu tidak hanya dapat dilihat melalui perolehan yang dicapai oleh anak didik dalam suatu pendidikan moral, tidak cukup pula dengan melihat penampilan orang-perorang guru di depan kelas, melainkan yang lebih adil adalah dengan melihat kedua-duanya (guru dan peserta didik) dalam situasi pendidikan disepanjang setting sekolah. Studi ini merupakan upaya untuk menelusuri keberhasilan pendidikan moral, khususnya di sekolah.

## **2. Masalah Budaya**

Indonesia merupakan negara yang berbhineka, yaitu memiliki keaneka ragam, seperti : agama, suku bangsa, adat, budaya, bahasa daerah dan lain-lain. Dari salah satu keaneka-ragaman tersebut merupakan titik permasalahan penulis dalam penyusunan tesis ini, yaitu keaneka-ragaman budaya. Kebudayaan-

kebudayaan daerah yang berjajar di sepanjang wilayah nusantara merupakan kekayaan dan kebanggaan bangsa yang harus dipelihara dan dikembangkan. Kebudayaan daerah memperkaya budaya nasional, bahkan dikatakan kebudayaan nasional adalah *puncak-puncak kebudayaan daerah*. Budaya dapat memberi pengaruh dalam membentuk *self concept*, yang pada gilirannya turut pula mewarnai perilaku seseorang. Menurut pemahaman ini berarti adanya perbedaan-perbedaan budaya akan menyebabkan pula perbedaan dalam sikap dan perilaku seseorang, dan hal ini akan memunculkan masalah yang dikenal dengan *masalah budaya*.

Bangsa Indonesia sangat menyadari akan masalah budaya ini. Lambang Negara *Bhineka Tunggal Ika* memberi petunjuk bahwa bangsa Indonesia mengakui perbedaan-perbedaan budaya, namun perbedaan itu harus berfungsi sebagai dorongan dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kehendak itu terpatri dalam Dasar Negara Pancasila, terutama sila ketiga yang secara khusus menegaskan tentang pentingnya nilai *Persatuan*.

Walaupun kita telah memiliki landasan konseptual akan azas persatuan dan kesatuan bangsa, harus diakui pula bahwa masalah-masalah budaya itu tetap bersifat laten, oleh karena itu perlu mendapat perhatian. Pada kenyataannya, kita masih mendengar adanya masalah-masalah budaya itu, terjadi benturan dalam budaya yang bersumber dan diperkuat oleh persepsi budaya, prasangka, dan stereotipe antar golongan. Koentjaraningrat (1986 : 345-346) mengidentifikasi bentuk-bentuk itu yang berkisar pada : (1) masalah hubungan umat beragama, (2)



masalah aneka suku bangsa, (3) masalah mayoritas-minoritas, dan (4) masalah integrasi kebudayaan.

Sekolah harus memberi tempat terhadap masalah-masalah budaya yang timbul. Bahkan terhadap masalah budaya ini peran pendidikan sekolah menjadi berbeda dengan peran pendidikan keluarga atau masyarakat (Durkheim, 1975/1925; Parson, 1951; Brameld, 1957). Perbedaan itu sebetulnya tidak terletak dalam tujuan (ends) melainkan dalam cara-cara (means). Adanya perbedaan ini dapat dipahami mengingat struktur sosial sekolah lebih komprehensif dibandingkan dengan struktur sosial dalam keluarga. Mengenai hal ini perlu juga dicermati makna yang terkandung dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) tahun 1989 tentang Satuan, jalur dan jenis Pendidikan ( Bab IV, pasal 10, 11, dan 12), yang pada intinya mengatur tentang kerja sama pendidikan antara pendidikan sekolah di satu pihak dengan pendidikan luar sekolah di pihak lain, dengan kata lain adanya kerja sama antara guru di sekolah dengan orang tua di rumah.

SMU-Plus yang berlokasi di Cisarua Kabupaten Bandung yang menjadi sasaran dalam studi ini merupakan sebuah sekolah yang memiliki struktur sosial budaya sebagaimana dimaksudkan di atas. Komunitas sekolah ini terdiri dari anak-anak (laki-laki) yang berasal dari pelosok Jawa Barat, walaupun mereka diambil dari anak-anak yang berprestasi, namun orang tua dari mereka terdiri dari orang tua yang struktur sosial budayanya berbeda satu sama lainnya. Kondisi seperti ini mungkin saja akan timbul masalah, walaupun mereka secara intelektual memiliki bahan dasar yang bagus, belum tentu intelektual tersebut diikuti dengan

moral yang bagus juga. Oleh karena itu penulis tertarik ingin mengetahui sampai sejauh mana moralitas yang dimiliki mereka dan bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh pihak sekolah.

### **3. Pengaruh Globalisasi**

Globalisasi merupakan salah satu fenomena dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ditandai dengan perubahan yang drastis dalam tata kehidupan umat manusia. Karakteristik dari globalisasi sebagaimana banyak diperbincangkan adalah terjadinya arus informasi yang deras dan dahsyat, yang mampu menerobos batas geografis. Terjadinya arus informasi yang ditopang oleh kecanggihan jaringan komunikasi, menyebabkan manusia seakan-akan hidup dalam dunia yang sempit.

Sebagai sebuah fenomena kehidupan, tentu globalisasi membawa nuansa-nuansa positif dan negatif. Dengan kata lain, globalisasi disamping membawa harapan-harapan baru, memunculkan pula masalah dan tantangan baru. Dalam arti positif, globalisasi memberi harapan akan kecenderungan yang lebih universalistik, dimana umat manusia lebih saling mengenal sehingga pengertian internasional semakin dapat ditegakkan walaupun disadari usaha ke arah itu masih merupakan perjuangan. Pada pihak lain, dalam arti negatif, globalisasi menimbulkan ancaman terhadap ideologi dan integritas suatu bangsa. Bagaimanapun globalisasi adalah dominasi atau intervensi dalam bentuk baru. Bahwa akan terjadi hegemoni kebudayaan dimana budaya yang satu akan didesak oleh budaya lain. Bahkan pada tingkat yang lebih riskan, globalisasi bukan saja

menimbulkan ancaman budaya, tetapi juga menimbulkan implikasi yang cukup serius bagi kehidupan politik, yang pada gilirannya akan membawa ancaman terhadap kedaulatan suatu bangsa.

Generasi yang paling diresahkan dari efek-efek negatif globalisasi ini adalah anak-anak muda. Tentu pengertian muda tidak terbatas pada usia, melainkan juga muda dalam pendidikan dan pengetahuan. Bahwa globalisasi akan “memakan” mereka yang tidak memiliki benteng psikis, yakni mereka yang pada dirinya belum ada kesadaran moral yang meyakinkan. Dalam hal ini iman dan komitmen terhadap budaya nasional memegang peranan yang sangat penting.

Isyu globalisasi ini telah banyak diperbincangkan di tanah air. Dari berbagai diskusi maupun tulisan-tulisan yang dapat dipantau oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa *pendidikan dan pembudayaan* merupakan alternatif yang paling baik dalam menghadapi arus globalisasi itu. Sebagai bangsa yang turut berkiprah dalam dunia internasional, Indonesia tentu tidak memilih untuk mengisolasi diri didalam mengantisipasi bahaya globalisasi itu. Globalisasi itu pada dasarnya bukan sesuatu hal yang harus ditakutkan, apabila kita telah siap menghadapinya dengan cara-cara yang telah diatur dalam ketentuan yuridis formal (Pancasila, UUD 1945, UUSPN, dan GBHN).

Dalam GBHN 1993 terdapat penekanan-penekanan yang sebetulnya berkaitan dengan upaya mengantisipasi efek globalisasi itu. Penekanan dimaksud adalah kata-kata *beriman, taqwa, berbudi luhur dan berwawasan* yang secara eksplisit terdapat dalam tujuan pendidikan nasional. Kata-kata itu mengisyaratkan tentang dua fungsi yang harus dilaksanakan oleh pendidikan moral, yakni (1)



*Meningkatkan komitmen terhadap norma-norma kepribadian bangsa yang mapan dan (2) Meningkatkan pemahaman baru melalui pengembangan pendidikan sehingga anak didik memiliki 'filter' dalam menyeleksi secara kritis nuansa-nuansa baru yang muncul senapas dengan arus globalisasi.*

Persoalannya adalah bagaimana kedua fungsi itu dapat dilaksanakan secara efektif oleh tiga pilar pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat). Dalam kaitan itulah studi ini diadakan, yakni *secara komprehensif ingin melihat upaya-upaya, langsung atau tidak langsung yang dilakukan sekolah dan guru-guru dalam rangka mengantisipasi gejolak globalisasi tersebut.*

### **C. Fokus Penelitian**

Sebagaimana telah digambarkan, bahwa studi ini berlandaskan pada tiga masalah pokok, yakni masalah metodologis, masalah budaya, dan masalah globalisasi. Ketiga masalah tersebut tidak bersifat dikhotomis (mutually exclusive), melainkan berada dalam kawasan wilayah masalah yang satu. Pemilahan itu hanya dimaksudkan untuk keperluan analisis. Untuk mempermudah dan memberi arah yang jelas, penelitian ini difokuskan pada masalah : **“Bagaimana pengaruh pola pendidikan yang berbasis disiplin terhadap perkembangan moral siswa di sekolah”?**

Disiplin merupakan esensi moral yang paling penting, bahkan bagi Durkheim (1975/1925) disiplin adalah tolak ukur moral, sehingga ia berkata “school without discipline is mob”. Pentingnya disiplin juga diakui Imam Santoso (1982) ketika ia berkata “pembinaan watak memerlukan disiplin”. Sedangkan bagi

Aristoteles disiplin tidak lain habituasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa disiplin sebagaimana juga dalam pendidikan keluarga merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam pendidikan sekolah.

Atas dasar itu, studi ini ingin menelusuri bagaimana disiplin dapat diterapkan di sekolah. Disiplin mempunyai arti yang luas, namun untuk arti yang sempit paling tidak disiplin dapat diartikan sebagai upaya “membiasakan” diri. Dalam kaitan ini, pengertian membiasakan diri tidak merupakan tujuan akhir (ends), melainkan lebih bersifat sebagai cara (means), sebab yang menjadi tujuan dari disiplin adalah kesadaran akan disiplin diri (self discipline). Beberapa indikator yang dipakai dalam studi ini untuk menelusuri masalah disiplin, antara lain : *ketertiban, kebersihan, waktu, pakaian dan upacara-upacara sekolah*. Indikator-indikator yang ditunjukkan itu, pada dasarnya telah dikonseptualisasikan dalam norma-norma atau tata tertib sekolah. Oleh karena itu untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan disiplin di sekolah adalah dengan mengaitkan norma-norma sekolah di satu pihak, dan implementasinya di pihak lain. Dengan demikian, pada akhirnya akan diperoleh gambaran mengenai *proses* (upaya-upaya pimpinan sekolah dan guru-guru) dan *hasil* (kesadaran siswa akan disiplin).

Perlu juga ditegaskan bahwa studi ini tidak dimaksudkan untuk mengukur masalah-masalah yang diajukan, melainkan suatu upaya penelusuran pola-pola pembinaan disiplin yang berpengaruh terhadap moral di sekolah, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif dan holistik mengenai rumusan



masalah yang diajukan. Untuk maksud itu digunakan pendekatan *naturalistik kualitatif*.

Mengingat masalah yang diajukan bersifat luas dan kompleks, maka perlu diajukan beberapa titik fokus penelitian. Meminjam terminologi Talcott Parsons, titik fokus ini dapat juga disebut variabel pola (*pattern variables*). Parsons (1951) melukiskan variabel pola ini sebagai : “A dichotomy, one side of which must be closed by an actor before the meaning of a situation is determinate for him and thus before he can act with respect to that situations”. Bahwa variabel pola yang satu tidak bersifat terpisah dengan yang lain, tetapi ada karakteristik dominan yang membedakan satu dengan lainnya.

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai pola pendidikan berbasis penerapan disiplin dalam kaitannya dengan perkembangan moral siswa di sekolah, maka ada empat titik fokus atau variabel pola yang diajukan berupa pertanyaan penelitian, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara penerapan tata tertib sekolah terhadap siswa SMU Plus ?
2. Bagaimana perilaku siswa SMU Plus dalam mengikuti pelajaran di dalam kelas atau ketika di luar jam belajar ?
3. Bagaimana cara Kepala Sekolah dan guru-guru memberikan contoh dalam penerapan disiplin terhadap siswanya ?
4. Kegiatan apa yang dilakukan oleh siswa setelah keluar/tamat dari SMU Plus ?

### **E. Tujuan Penelitian.**

Studi tentang pengaruh pola pendidikan berbasis penerapan disiplin terhadap perkembangan moral siswa di SMU-Plus Cisarua Kabupaten Bandung ini secara umum bertujuan ingin memperoleh gambaran secara komprehensif tentang pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan pada sekolah tersebut. Secara rinci tujuan tersebut penulis gambarkan sebagai berikut :

1. Ingin memperoleh gambaran tentang cara penerapan tata tertib sekolah terhadap siswa SMU Plus.
2. Ingin memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perilaku siswa SMU Plus dalam mengikuti pelajaran di dalam kelas atau ketika di luar jam belajar.
3. Ingin memperoleh gambaran tentang cara Kepala Sekolah dan guru-guru memberikan contoh dalam penerapan disiplin terhadap siswanya.
4. Ingin memperoleh gambaran tentang apa yang dilakukan oleh siswa setelah keluar/tamat dari SMU Plus.

### **F. Kegunaan Penelitian.**

Melalui pengkajian konseptual maupun dari temuan-temuan otentik di lapangan, diharapkan studi ini dapat menyumbangkan bahan-bahan pemikiran yang bermanfaat baik untuk keperluan teoritis, maupun untuk keperluan praktis guna lebih memahami persoalan-persoalan moral yang memang menjadi tujuan utama pendidikan nasional. Dapat ditegaskan bahwa studi ini merupakan suatu upaya untuk menyumbangkan pemikiran yang berguna dalam menata sistem

pendidikan nasional, khususnya pendidikan moral di Sekolah Menengah Umum (SMU). Di pihak lain, studi ini merupakan awal dari babak baru bagi peneliti sendiri untuk lebih memantapkan wawasan dan pengalaman menuju peningkatan kualitas diri. Secara lebih spesifik dapat dinyatakan bahwa kegunaan studi ini adalah :

**1. Kegunaan Teoritis.**

Studi ini diharapkan dapat menyumbangkan informasi kepada teman-teman yang seprofesi dan dapat memperkaya pemahaman mengenai pendidikan moral melalui penerapan disiplin khususnya di tingkat sekolah sebagai lembaga pendidikan. Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna dalam menilai, merekonsepsi dan merumuskan tuntutan moral ideal di satu pihak, dengan kenyataan yang riil di lapangan.

**1. Kegunaan Praktis.**

Dapat melahirkan bahan-bahan pemikiran yang berguna bagi pendidikan umum, sehingga dapat dipakai sebagai acuan dalam mengembangkan landasan-landasan pendidikan umum yang lebih mantap dalam arti yang luas, dan menyusun program-program pendidikan umum di sekolah dalam arti yang sempit.

**2. Kegunaan Metodologis.**

Melalui pendekatan mikroetnografis, memungkinkan diperoleh informasi-informasi yang pada lazimnya tidak terjamah secara kuantitatif. Hal ini akan berguna dalam rangka mengembangkan cara-cara memahami masalah-

masalah pendidikan serta menunjukkan eksistensi pendekatan etnografis di satu pihak, dan menunjukkan nilai kebermanfaatannya hasil-hasilnya di pihak lain.

### **3. Kegunaan Bagi Peneliti.**

Melalui telaah konseptual, pengalaman-pengalaman di lapangan, dan dipadukan oleh masukan dan bimbingan dari nara sumber (terutama pembimbing), studi ini memberikan manfaat yang berharga bagi peneliti dalam rangka meningkatkan pengalaman dan memperluas wawasan untuk lebih memahami masalah-masalah pendidikan dimana peneliti mengabdikan diri.

### **G. Asumsi Dasar.**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa asumsi dasar yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diajukan. Adapun asumsi dasar itu adalah sebagai berikut :

1. Disiplin merupakan suatu hal yang diperlukan dalam kehidupan manusia dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam pendidikan untuk mencapai perkembangan moral yang maksimal.
2. Setiap manusia lahir dalam keadaan bersih seperti kertas yang belum ada tulisannya. Melalui interaksi ( dalam hal ini pendidikan), mulai dari pendidikan dalam keluarga, sekolah dan di masyarakat yang tadinya bersih akan berubah terisi dengan berbagai pengalaman yang diterima. Baik buruknya perilaku (moral) seseorang tergantung kepada pendidikan yang ia terima.

3. Pendidikan moral merupakan salah satu yang dapat menyelamatkan manusia dalam hidupnya.

#### H. Definisi Operasional.

Untuk memperjelas dan memberi arah dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa definisi operasional yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pengaruh yaitu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan manusia. Misalnya seseorang setelah mengikuti kegiatan dalam pendidikan seperti penerapan disiplin, bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku orang tersebut, tentunya pengaruh positif yang diharapkan.
2. Pola; Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Anton M. Moeliono (1988 : 692) berarti kurikulum, merupakan bentuk pengorganisasian program kegiatan ataupun program belajar yang hendak disajikan kepada murid oleh lembaga pendidikan tertentu. Arti lain adalah pemikiran, yaitu sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterimanya di masyarakat sekelilingnya.
3. Pendidikan berasal dari kata didik, yang artinya proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan (Anton M. Moeliono, 1988 : 204)
4. Disiplin adalah kemampuan yang datang dari diri seseorang untuk mengendalikan diri berdasarkan atas ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban melalui kesadaran yang timbul dari dalam diri.





5. Berbasis disiplin. Basis berarti basic (bahasa Inggris), yaitu asas atau landasan. Jadi pengertian berbasis disiplin adalah segala tindakan yang dilakukan yang berbasaskan pada pengertian disiplin seperti telah dituliskan di atas.
6. Perkembangan Moral artinya suatu perubahan yang terjadi setelah mengikuti proses pendidikan melalui penerapan disiplin. Perubahan ini terlihat dalam perilaku siswa, baik di sekolah maupun dalam kehidupan keluarga masing-masing.
7. Peraturan Sekolah adalah tatanan atau ketentuan yang dibuat oleh sekolah baik yang tertulis atau tidak tertulis yang terwujud dalam tata tertib sekolah.
8. Siswa adalah peserta didik yang terdaftar di sekolah yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini.
9. SMU Plus dalam penelitian ini ialah sebuah sekolah dimana siswanya memperoleh pelajaran tambahan khusus seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, Akuntansi, komputer, dan agrobisnis, disamping itu mereka diasramakan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Karya tulis ini disusun menjadi 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar belakang Masalah
  - B. Perumusan Masalah / Identifikasi Masalah
  - C. Fokus Penelitian
  - D. Pertanyaan Penelitian
  - E. Tujuan penelitian

F. Kegunaan Penelitian

G. Asumsi Dasar

H. Definisi Operasional

I. Sistematika Penulisan

## BAB II KAJIAN KONSEPTUAL

A. Konsep Kedisiplinan

1. Pengertian Disiplin

2. Beberapa Teori Dalam Pendekatan Disiplin Siswa

3. Proses Penanaman Disiplin Dalam Pendidikan Oleh Guru

4. Disiplin Dalam Belajar

5. Penanaman Disiplin Dalam Perkembangan Siswa

6. Disiplin Kerja Guru

B. Konsep Moral

1. Pengertian Moral

2. Pengertian Pendidikan Moral

3. Perspektif Pendekatan Pendidikan Moral

4. Profil Guru Pendidikan Moral

5. Keterkaitan Pendidikan Moral Dengan Pendidikan

Umum

C. Metode Penerapan Disiplin

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Karakteristik dan Sumber Data

1. Karakteristik Data
2. Sumber Data

### B. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi
2. Wawancara
3. Studi Dokumentasi

### C. Kisi-kisi Penelitian

### D. Langkah-Langkah Pengumpulan Data

1. Tahap Orientasi
2. Tahap Eksplorasi
3. Tahap member Chek

### E. Instrumen Penelitian

### F. Teknik Pengolahan Data

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi dan Interpretasi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Sekolah
2. Cara Penerapan Tata Tertib Sekolah Terhadap Siswa SMU Plus
3. Perilaku Siswa SMU Plus Dalam Mengikuti Pelajaran di Kelas Atau Ketika di Luar Jam Belajar

4. Cara Kepala Sekolah dan Guru-Guru Memberikan Contoh Dalam Penerapan Disiplin Terhadap Siswanya
5. Profesi Siswa Lulusan Dari SMU Plus

#### B. Pembahasan

1. Cara Penerapan Tata Tertib Sekolah Terhadap Siswa SMU Plus
2. Perilaku Siswa SMU Plus Dalam Mengikuti Pelajaran di Kelas Atau Ketika di Luar Jam Belajar
3. Cara Kepala Sekolah dan Guru-Guru Memberikan Contoh Dalam Penerapan Disiplin Terhadap Siswanya
4. Profesi Siswa Lulusan Dari SMU Plus

#### C. Temuan Hasil penelitian

### BAB V

#### KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

##### A. KESIMPULAN

##### B. IMPLIKASI

##### C. REKOMENDASI

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN